



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 652 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH ANTARWAKTU KALURAHAN

TRIRENGGO, KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

MASA JABATAN TAHUN 2016-2022

BUPATI BANTUL,

Membaca : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan  
Trirenggo, Kapanewon Bantul Nomor 2 Tahun 2020 tentang Calon  
Lurah Antarwaktu Terpilih;

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah  
antarwaktu Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul Kabupaten  
Bantul Tahun 2020 telah berjalan secara demokratis sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) huruf b angka 8,  
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019  
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian  
Lurah, Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah  
Antarwaktu dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga  
puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Badan  
Permusyawaratan Kalurahan tentang Calon Lurah Antarwaktu  
terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang  
Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Antarwaktu Kalurahan  
Trirenggo, Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Masa Jabatan  
Tahun 2016-2022.

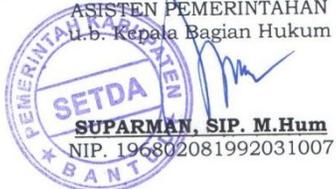
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH ANTARWAKTU KALURAHAN TRIRENGGO, KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2016-2022.

- KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat :  
Nama : ERNAWATI KUSUMANINGSIH,  
M.Or.  
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 3 Maret 1987  
sebagai Lurah Antarwaktu Kalurahan Tlirenggo, Kapanewon  
Bantul, Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2016-2022,  
terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEDUA : Masa jabatan Lurah Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam  
diktum KESATU sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah  
Desa Tlirenggo Masa Jabatan Tahun 2016-2022.
- KETIGA : Lurah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan  
penghasilan dan tambahan penghasilan lainnya sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2020  
BUPATI BANTUL,  
ttd  
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Bantul;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tlirenggo, Kapanewon Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.